

II. KERANGKA TEORITIS

A. Definisi Konseptual Mengenai Kader dan Kaderisasi

Pengertian kader adalah:

“Sumber daya manusia yang melakukan proses pengelolaan dalam suatu organisasi. Dalam pendapat lain kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum¹.”

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Menurut Mawasdi Rauf;

”Kaderisasi merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini. Pada masa lalu, kaderisasi dilakukan bukan oleh partai politik, melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi *underbow* di partai. Pimpinan partai tinggal menerima kader-kader yang telah dihasilkan oleh ormas-ormas tersebut. Pada masa demokratisasi sekarang ini, pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan kader secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kader-kader partai politik yang akan menjadi pimpinan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil pimpinan nasional di masa depan. Bila partai politik mampu

¹ www.bmpn-diy.org/kader, di unduh pada tanggal 10 september 2012.

menghasilkan kader yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.”

Proses kaderisasi, partai politik memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut *visioning*. Penanaman ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi yang merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan².

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya³.

Sumber daya manusia sebagai calon anggota atau calon kader dalam partai politik akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami *platform* partai, sejarah perjuangan partai, arah perjuangan partai dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh partai serta memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci yaitu dengan penanaman ideologi.

² Syafiuddin Tohir, PMII, 2007

³ Jimly Assiddiqy, 2006: 160

B. Definisi Konseptual Mengenai Partai Kader

Makna dari partai kader, yaitu:

“Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dengan keanggotaan berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya ideologi yang dianut partai ini adalah Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Sehingga partai kader lebih tampak sebagai kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan disiplin⁴.”

Selain itu juga ada pengertian partai kader yang dikemukakan oleh Ari

Darmastuti dan Tabah Maryanah⁵, yaitu:

”Partai kader, yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat, melalui pengkaderan yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten, tanpa pandang bulu. Struktur organisasi sangat hirarki sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas, karenanya sangat elitis.”

Berdasarkan dua pengertian partai kader dari ahli-ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik yang mengandalkan kualitas anggota serta keanggotaannya melalui sistem yang sudah ditentukan dengan ketat, berjenjang serta intensif yang memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Partai kader biasanya menganut ideologi Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat.

C. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses “intervensi” dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti

⁴ Ichlasul Amal (1996: pengantar)

⁵ *Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia* pada halaman 12 (2004).

penting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik.

Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipedari partai yang bersangkutan.

Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga kontinuitasnya, maka dibutuhkan pelebagaan kaderisasi. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelebagaan kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas pelebagaan demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi formal dan dimensi politis.

Dimensi formal berkenaan dengan soal bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi dan perjuangan partai butuh dicangkokkan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi. Dengan kata lain ini berkenaan dengan pembentukan sistem formal kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik, yakni ruang tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan atau faksi-faksi internal partai yang rawan konflik. Secara spesifik, benturan antara dimensi formal dan politis ini akan diawali dari ketegangan kebutuhan partai untuk menciptakan standar-standar kapasitas

tertentu bagi para anggotanya di satu sisi, dan potensi kehendak politis untuk mengabaikannya. Dimensi politis yang muncul di sini sebenarnya juga karena keterkaitan kaderisasi dengan dimensi politis dalam proses rekrutmen.

Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup dengan hanya mencantumkannya dalam AD/ART. Ini berikutnya harus diterjemahkan dalam program-program partai dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan. Komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi harus bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang kongkret dan dipahami oleh publik. Oleh karena itu, setidaknya komitmen dan tingkat keseriusan itu dapat diukur dengan mencermati beberapa indikator sebagai berikut :

a) Sistem Kaderisasi:

- 1) Orientasi pengkaderan
- 2) Kesesuaian materi kaderisasi dengan platform dan program
- 3) Mekanisme kaderisasi

b) Kelembagaan :

- 1) Keberadaan lembaga kadrisasi dalam tiap tingkatan kepengurusan partai
- 2) Penjaluran kader pasca kaderisasi (penjaluran output)
- 3) Adanya trainer yang melaksanakan kegiatan pengkaderan

- c) Kuantitas :
 - 1) Jumlah orang yang mengikuti pengkaderan
 - 2) Jumlah trainer

- d) Kualitas :
 - 1) Tingkat kapasitas keahlian peserta kaderisasi
 - 2) Karya atau prestasi peserta pasca kaderisasi

- e) Waktu dan Dana :
 - 1) Alokasi waktu yang dialokasikan bagi program-program pengkaderan
 - 2) Alokasi dana yang dianggarkan untuk program-program pengkaderan

1. Kriteria Kader

Kader adalah pendukung yang telah menjadi anggota dari partai politik tertentu yang ditentukan berdasarkan mekanisme rekrutmen yang berlaku dalam setiap partai politik. Mereka ini berikutnya akan diproyeksikan untuk tampil sebagai penggerak roda organisasi partai, baik sebagai pengelola atau pemimpin partai maupun untuk menjadi pejabat-pejabat publik yang direkomendasikan oleh partai.

Agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka kader partai harus terlebih dahulu bersepakat dengan garis ideologi dan aturan-

aturan yang berlaku dalam partai. Ini misalnya ditunjukkan dengan penerimaan terhadap AD/ART dan arah perjuangan partai. Konsekuensinya, saat bersamaan, partai politik tidak dapat mentoleransi kader-kadernya yang secara fundamental tidak bersepakat dengan kepemimpinan dan ide-ide perjuangan partai, loyal kepada partai lain atau menolak untuk terlibat kerja dalam struktur partai. Namun demikian, setiap partai politik harus tetap terbuka bagi munculnya berbagai pandangan maupun inisiatif dari individu-individu partai. Ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam partai politik. Artinya, partai politik sungguhpun dituntut untuk memiliki konsistensi ideologi dan format organisasi yang koheren dengannya, namun harus memperhatikan munculnya ide-ide dan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan obyektif yang ada.

Untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan kebutuhan partai, maka tiap partai memiliki kriterianya masing-masing. Perbedaan kriteria kader ini adalah konsekuensi dari perbedaan tipe partai, sungguhpun kombinasi juga dimungkinkan karena pergeseran kecenderungan dari partai yang bersangkutan.

Tabel 1 : Kriteria Kader

Tipe Partai	Kriteria Kader
Partai Massa	<ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai. • Kader memiliki kedekatan sejarah sosio-kultural dengan basis sosio-kultural pendukung partai. • Kader harus dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai. • Kader adalah simpul mobilisasi pendukung partai (simpul massa).
Partai Kader	<ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesamaan ideologi dengan ideologi partai meskipun mungkin dalam batas yang cair. • Kader dihasilkan melalui proses pengkaderan internal partai namun bisa juga tidak. • Kader memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan memiliki kapasitas menduduki jabatan-jabatan publik. • Kader tidak mesti menjadi simpul massa / mobilitas massa.
Partai Catch all	<ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesamaan ideologi dengan

	<p>ideologi partai meskipun mungkin dalam batas yang sangat cair.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kader memiliki kesesuaian dengan isu-isu utama partai bagi kemenangan pemilu. • Kader tidak mesti berasal melalui kaderisasi formal partai, namun bisa juga berasal dari mantan anggota atau kader partai lain. • Kader memiliki kualitas untuk merancang kebijakan partai dan memiliki kapasitas menduduki jabatan-jabatan publik.
--	---

2. Alternatif Model Kaderisasi

Untuk mendapatkan kader-kader dengan kriteria yang dibutuhkan maka partai politik butuh untuk mendesain sistem kaderisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan partai untuk menjawab tantangan kebutuhan. Berikutnya, untuk menjamin keberlanjutan kaderisasi, maka sistem kaderisasi ini butuh dilembagakan segera formal dalam satu lembaga khusus yang dalam logika struktur fungsi, format kelembagaannya akan mengikuti fungsi-fungsi yang dibebankan dalam sistem kaderisasi berikut.

Sistem kaderisasi bisa disusun berdasarkan model hirarkhi/perjenjangan, spesialisasi/keahlian atau campuran/kombinasi dari keduanya⁶. Model ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi partai yang akan dijalankan di tiap wajah partai. Selain itu masing-masing model akan memiliki implikasi, misalnya, bagi pengelolaan struktur organisasi partai baik untuk bagan organisasi yang sifatnya vertikal (struktur vertikal organisasi) atau yang bersifat horisontal (struktur keahlian/spesialisasi dari organisasi), sitem karir, dan sebagainya.

Tabel 2 : Alternatif Model Kaderisasi

KADERISASI		
Kebutuhan	Sifat	Lembaga
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, ▪ Kebutuhan mengorganisir dan memobilisasi massa pendukung, ▪ Menjadi jembatan komunikasi antara partai dengan pendukung, publik luas dan media massa ▪ Kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hierarki/Perjenjangan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat Dasar ✓ Tingkat Menengah ✓ Tingkat Lanjut ▪ Spesialisasi/keahlian <ul style="list-style-type: none"> ✓ Training Policy making (based issue) ✓ Training Organizer ✓ Training Fund raiser ✓ Training berbasis isu. Misalnya : gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga pengkaderan (kaderisasi formal dan/atau non formal) ✓ Lembaga pengkaderan tingkat nasional ✓ Lembaga pengkaderan tingkat Provinsi ✓ Lembaga

⁶ Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab 1 Manajemen SDM Parpol, dalam bahan bacaan utama, mata kuliah partai politik, pemilu dan legislasi, S2 Politik Pemerintahan UGM.

kemampuan penggalangan dana (fund rising)	▪ Campuran/kombinasi	pengkaderan tingkat Kabupaten/Kota ✓ Lembaga pengkaderan tingkat desa
---	----------------------	--

2.1 Model Hirarkhi

Model hirarkhi adalah penjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

Penggunaan model penjenjangan dengan model hirarkhi seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Ini misalnya dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal.

Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi). Sedangkan pentahapan sebagai akibat dari kebutuhan untuk melakukan pentahapan karir bisa berguna bagi salah satu persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat. Ini misalnya tampak tingkat melalui persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.

2.2 Model Spesialisasi/Keahlian

Selain dengan menggunakan model hirarkhi, jenjang kaderisasi juga disusun dengan model yang berbasis spesialisasi atau keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh seorang kader untuk dapat terlibat secara aktif sebagai aktivis partai politik. Model ini didasarkan pada rasionalisasi adanya beragam fungsi dalam pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga materi-materi kaderisasi lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai. Saat bersamaan, model berbasis spesialisasi ini juga akibat dari upaya penciptaan sistem karir yang lebih bersifat menyebar, artinya disesuaikan dengan karir yang hendak ditempuh oleh seorang kader partai.

Keberagaman fungsi-fungsi ini misalnya menyangkut fungsi internal seperti keahlian manajerial dalam mengelola organisasi, keahlian sebagai calon pengelola hubungan partai dengan masyarakat dan media, keahlian sebagai penggalang dukungan dalam pemilu, keahlian sebagai penggalang dana, dan sebagainya. Fungsi-fungsi ini diandaikan berdiri sendiri namun tetap dalam satu kesatuan sistem pengelolaan partai.

D. Kerangka Pikir

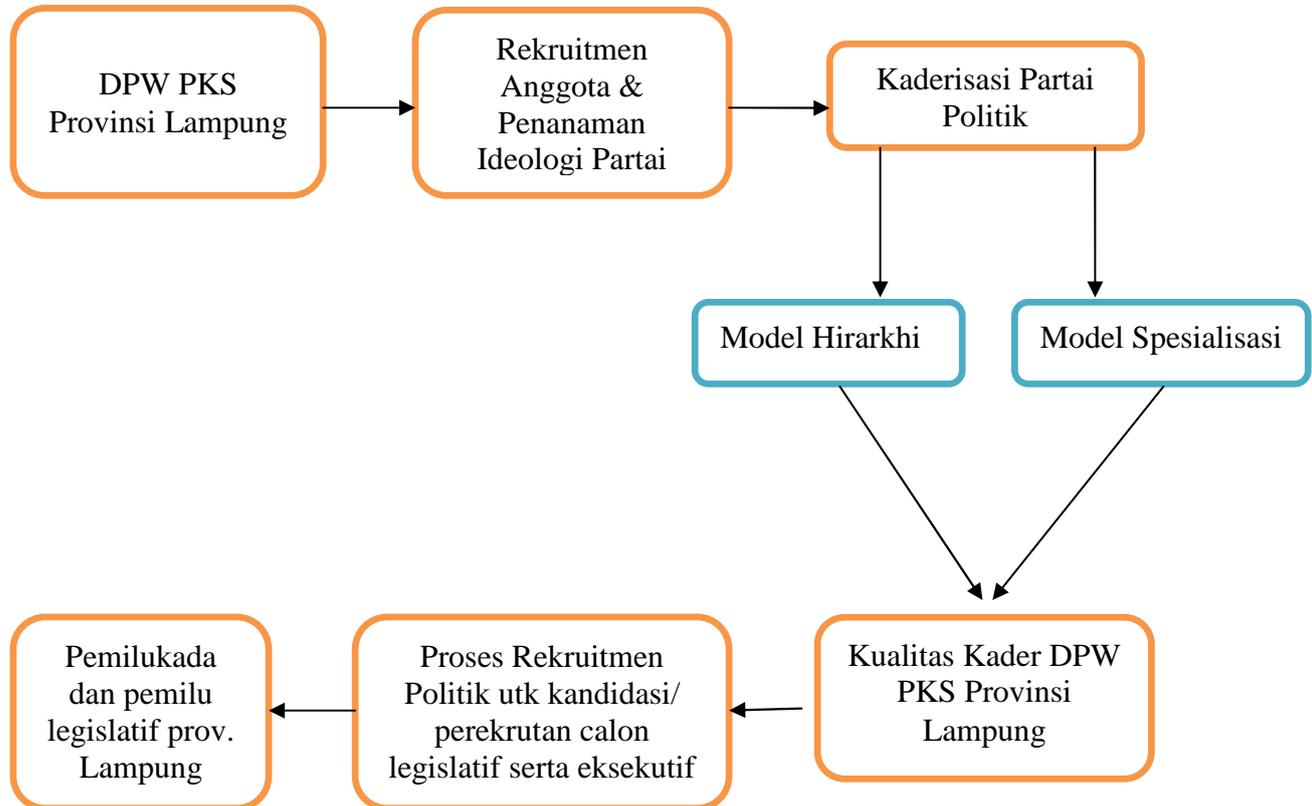
PKS, sebagai partai politik menjalankan salah satu fungsinya, yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik di sini maksudnya adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan mengadakan proses seleksi/penjaringan, rotasi dan mobilitas politik pada anggota atau kader dari partai politik untuk penempatan jabatan di dalam atau di luar partai (eksekutif dan legislatif) berupa jabatan administratif maupun politik yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari kader tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi kaum muslimin, ulama, tokoh masyarakat dan intelektual.

Pelaksanaan rekrutmen politik dengan menjalankan tujuan dan fungsinya untuk menghasilkan kader yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Perluasan dalam rekrutmen kader ini termasuk pada bagaimana menyusun kriteria untuk calon kader yang akan menjadi kualifikasi serta bagaimana mekanisme yang akan dilakukan dalam proses ini. Untuk itulah sebelum

melakukan rekrutmen politik PKS tentunya melakukan proses pengkaderan untuk menghasilkan kader-kader yang mempunyai kualifikasi sebagai kader yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai pejabat publik melalui arena pemilukada maupun pemilu legislatif.

PKS sebagai partai yang berideologi Islam memiliki usaha untuk peningkatan jumlah kader maupun basis massa pada setiap waktunya yang terlihat pada pemilu 1999, 2004, hingga 2009 yang lalu. Sehingga hal ini dapat diteliti, yaitu dalam penentuan kriteria serta mekanisme untuk menjaring kadernya, bagaimana PKS menanamkan ideologi Islam pada calon kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas yang tidak saja dapat dinilai oleh partai sendiri tetapi juga pada masyarakat untuk posisi jabatan publik, dan juga pada Islam yang menjadi ideologinya. Lalu yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimanakah proses dari model kaderisasi yang dilakukan oleh PKS di tengah ketatnya kompetisi elektoral dalam memperluas basis massa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini.



Bagan 1. Skema Kerangka Pikir